

BIDANG KAJIAN: HUBUNGAN INTERNASIONAL

LAPORAN PENELITIAN



**TERRORISME DAN INVESTASI TIONGKOK DI FILIPINA:
IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
PENGUATAN LAYANAN KEAMANAN**

PENELITI

SUGIARTO PRAMONO, SIP, MA., PHD.

NPP: 04.08.1.0112

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul penelitian : Terrorisme dan Investasi Tiongkok di Filipina: Implikasinya terhadap Pertumbuhan dan Penguatan Layanan Keamanan
2. Bidang Kajian : Hubungan Internasional
3. Identitas Peneliti :
- a) Nama : Sugiarto Pramono, PhD
 - b) TTL : Tegal, 2 Februari 1983
 - c) NPP : 04.08.1.0112
 - d) NIDN : 0602028301
 - e) Jabatan/ golongan : III c/ AA
 - f) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - g) Prodi : Hubungan Internasional
 - h) Pusat Penelitian : LP2M Unwahas
 - i) Alamat Intitusi : Fisip, Unwahas, Jl. Menoreh Tengah X/22, Sampangan, Semarang, Tlp. 024-8505680
 - j) Hp : 081359140799
 - k) Email : sugiartopramono@unwahas.ac.id
4. Usulan jangka waktu penelitian : 6 bulan
5. Usulan Biaya : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Disetujui oleh Dekan FISIP

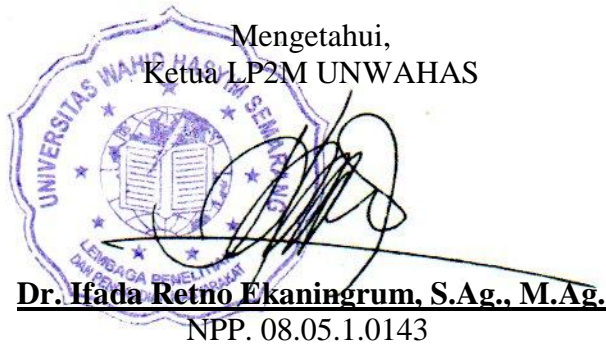


Semarang, 7 Juli 2021
Peneliti,



Sugiarto Pramono, PhD.
NPP: 04.08.1.0112

Mengetahui,
Ketua LP2M UNWAHAS



Dr. Hada Retno Ekaningrum, S.Ag., M.Ag.
NPP. 08.05.1.0143

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
BAB 2 METODE PENELITIAN.....	8
BAB 3 LITERATURE REVIEW.....	9
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
A. Investasi Tiongkok Di Filipina	12
B. Layanan Keamanan.....	16
BAB 5 PENUTUP.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor di balik meningkatnya belanja militer dan ekonomi Filipina. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan serangan terrorist di sisi selatan Filipina dan lonjakan hubungan ekonomi dengan Tiongkok menjadi konteks penting. Seperti negara berkembang lainnya, Filipina berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai landasan bagi aktivitas ekonominya. Kebutuhan tersebut bersinergi dengan kepentingan Tiongkok untuk berinvestasi. Hal itu memicu pertumbuhan ekonomi nasional di Filipina. Sayangnya, problem keamanan di sisi selatan menjadi tantangan serius bagi masa depan perekonomian. Situasi kontradiksi itu (pertumbuhan dan krisis keamanan) mendorong pemerintah meningkatkan anggaran militer. Pertumbuhan ekonomi sebagai akibat meningkatnya investasi asing menjadi konteks yang berkontribusi bagi peningkatan layanan keamanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa data dan literature. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu keamanan dan pertumbuhan. Dalam konteks ini, pendekatan pertumbuhan menjelaskan bagaimana peningkatan interaksi ekonomi dengan Tiongkok mendorong dinamika ekonomi nasional Filipina. Sementara pendekatan keamanan menjelaskan bagaimana stabilitas keamanan menjadi kebutuhan keberlangsungan pertumbuhan. Argumen penelitian ini menentang temuan umum penelitian sebelumnya bahwa di negara berkembang pertumbuhan militer dan ekonomi berkorelasi negative, kasus Filipina menunjukkan sebaliknya.

Kata kunci: Terrorisme, Belanja Militer, Layanan Keamanan, Stabilitas, Pertumbuhan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadi trend peningkatan anggaran belanja militer dan pertumbuhan ekonomi di Filipina secara simultan. Hubungan pengeluaran militer dan pertumbuhan di suatu negara sangat kompleks. Namun bila membatasi hubungan dua variabel tersebut hanya di negara-negara berkembang¹ pola hubungan menjadi lebih spesifik, yaitu bahwa hubungan dua variable tersebut berkorelasi negative. *“Covering nearly 170 works, it finds that the more recent studies—those making use of data since the end of the cold war—provide increasingly strong evidence of an overall negative effect of military expenditure on economic growth”* (Dunne and Tian, 2013, 5). Dari perspective tersebut, maka trend yang terjadi di Filipina adalah fenomena unik. Sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Sedini mungkin perlu diketahui bahwa meningkatnya belanja militer dan pertumbuhan Filipina dilingkupi oleh dinamika ekonomi dan keamanan di tingkat domestic dan internasional. Di tingkat domestic: (1) krisis keamanan di Mindanao yang dipicu oleh terrorisme dan separatisme; (2) kebutuhan infrastruktur untuk mendorong perekonomian. Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri untuk mendorong perekonomian nasional. Problem ekonomi menjadi lebih kompleks dengan menurunnya stabilitas keamanan di sisi Selatan.

Sementara di tingkat internasional juga terdapat 2 konteks yang melingkupi: (1) kebangkitan Tiongkok yang ditandai dengan lompatan distribusi investasi ke Asia tenggara. Investasi Tiongkok meningkat 94, 48% di ASEAN 6 dari 15.945, 2 juta dollar (2008-2012) menjadi 31.011,80 juta dollar (2013-2017). Dan meningkat di CLMV dari 97, 09% dari 5498, 1 juta dollar menjad 10.836, 50 juta dollar di periode tersebut (ASYB, 2018, 147 dan 148); dan ketegasan China di Laut China Selatan (Turcsányi, 2018). (2) Asia Tenggara merupakan

¹ There is no established convention for the designation of "developed" and "developing" countries or areas in the United Nations system. In this article Developing Countries is understood as a country with an underdeveloped industrial base and relatively low human development index (HDI). GDP is commonly used as an indicator to determine the level of a country's economy. The UN accepts unilateral claims that a country is still developing.

kawasan yang memiliki tantangan keamanan yang bersumber dari terorisme. Jaringan kelompok teroris terdapat di sejumlah negara besar di kawasan ini termasuk Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia (<https://ourworldindata.org/terrorism>).

Di negara berkembang, potensi ekonomi belum diberdayakan secara optimal. Bahan mentah umumnya langsung diekspor tanpa proses *added value*. Sementara import diarahkan ke barang-barang konsumsi. Stabilitas keamanan kurang mendapat perhatian sehingga sering menjadi tantangan bagi kurang menarik bagi investor. Konteks tersebut memungkinkan peningkatan belanja militer untuk tujuan penguatan stabilitas keamanan. Namun seringkali pengalihan anggaran ke sector keamanan tersebut harus mengurangi aliran anggaran ke sector produktif. Pola tersebut terlihat di negara-negara Afrika, Timur Tengah, termasuk Pakistan dan banyak negara berkembang lain.

Di Afrika Selatan setidaknya dalam rentang 1988-2015 terdapat ketimpangan distribusi modal antara sector militer dan produktif di mana sector militer dialiri modal dengan porsi yang lebih besar. Hal tersebut membuat sector produktif kurang berkembang. Sehingga Phiri (2019) menyarankan "... the current levels of military spending...are too high in the South African economy and need to be transferred towards more productive non-military expenditure in order to improve the performance of economic growth and other growth determinants." (Phiri, A., 2019). Di Timur Tengah hubungan dua variable berkaitan dengan variable konflik. Konflik dalam hal ini menciptakan ketidakstabilan keamanan di satu sisi dan memancing peningkatan anggaran militer yang merugikan proses ekonomi. "...defense spending has a negative effect on economic growth, which aggravates during times of internal and external conflicts." (Künü, S., Hopoglu, S., & Bozma, G., 2016). "...the effect of military expenditure on economic growth is nonlinear..." (Duygu Yolcu Karadam, Jülide Yildirim, and Nadir Öcal. 2017). Kasus Pakistan menguatkan pandangan bahwa belanja keamanan dan pertumbuhan di negara berkembang berkorelasi terbalik. "... a positive impact of military spending on the ecological footprint, while a negative impact on economic growth." (Ahmed, Z., Zafar, M. W., & Mansoor, S., 2020)

Berbeda dengan negara-negara berkembang tersebut, Filipina memiliki pola unik, yaitu belanja militer dan ekonomi tumbuh secara simultan. Pengeluaran militer Filipina adalah US \$ 2.497 juta (2009) meningkat sebesar 50,30% menjadi US \$ 3753 juta (2018) (SIPRI Military Expenditure Database, April 2019). Sementara GDP negara itu juga tumbuh 80, 98%, dari US

\$ 173.427 juta (2008) menjadi US \$ 313.875 juta (2017) (The ASEAN Secretariat, 2018, 45). Di sinilah permasalahan riset muncul, yakni terdapat kesenjangan antara pengalaman negara-negara berkembang secara umum dengan pengalaman yang dilalui Filipina.

B. Rumusan Masalah

Pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa relasi belanja militer dan pertumbuhan berkorelasi negative. Hal ini di alami oleh negara-negara di Afrika dan Timur Tengah, termasuk Pakistan serta banyak negara-negara berkembang lain. Namun kasus Filipina unik belanja militer dan pertumbuhan justru bergerak simultan, sehingga pertanyaan penelitian yang muncul: mengapa pertumbuhan belanja militer dan ekonomi terjadi secara simultan di Filipina?

BAB 2

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mencari faktor berupa situasi yang menyebabkan belanja militer dan ekonomi tumbuh secara simultan di Filipina. Untuk mengeksplorasi unit analisa itu metode kualitatif dipilih. Hal ini dikarenakan, riset yang bertujuan mencari faktor atau situasi yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa membutuhkan kerja eksplorasi yang kuat. Sementara metode kualitatif merupakan “an effort to interpret phenomena by presenting interpretations by others to complement our understanding.” (Greenhalgh, T. and Rod Taylor, 1997) untuk mengungkap kebenaran. Di saat yang sama, “exploratory, flexible and flexible, driven by data and sensitive to context” (Mason, J., 2002) menjadikan metode ini memiliki ketajaman untuk membongkar lebih komperhensef permasalahan yang diteliti.

Sementara teknik penelitian yang dipakai adalah studi literature dan analisa data. Analisa literature digunakan untuk memetakan akumulasi pengetahuan yang didapat para peneliti sebelumnya. Dengan demikian capaian pengetahuan sebelumnya terkait topik yang sedang diteliti dapat diketahui dengan baik. Sehingga penelitian yang dilakukan ini memiliki dasar pengetahuan yang kokoh. Struktur berfikir seperti ini penting karena dengan mengetahui perdebatan yang telah berlangsung tentu menuntun peneliti untuk mengeksplorasi ruang-ruang baru yang belum (atau setidaknya: kurang) mendapat perhatian dari para peneliti sebelumnya. Cara membangun argumentasi ini membuat riset memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Sementara teknik analisa data, digunakan untuk menganalisa data sepesifik tentang kasus yang diteliti yaitu pertumbuhan belanja militer dan pertumbuhan. Lebih jauh, untuk memberikan analisa yang lebih komperhensif sejumlah konteks dihadirkan. Di antaranya data aksi terrorisme, separatism, perdagangan dan investasi. Termasuk konteks social politik baik di level domestic dan internasional. Dengan menghadirkan aneka konteks tersebut gambaran komperhensif tentang hubungan belanja militer dan ekonomi di Filipina menjadi lebih jelas. Sehingga faktor-faktor (atau seting yang berada dibalik dan terutama menyebabkan) menuculnya pertumbuhan belanja militer dan ekonomi di Filipina dapat diketahui.

BAB 3

LITERATURE REVIEW

Hubungan 2 variabel tersebut sejatinya sangat kompleks namun bila perhatian difokuskan ke pengalaman negara-negara berkembang, relasinya menjadi sederhana, yakni bahwa peningkatan belanja militer umumnya berpengaruh negative terhadap pembangunan (Dunne and Tian, 2013, 5). Negara berkembang memiliki sejumlah karakteristik, yaitu: pendapatan riil per kapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, tingkat pengangguran tinggi, ketergantungan pada sektor primer serta ketergantungan pada ekspor komoditas primer [Agarwal, Agustus 1, 2017]). Sejumlah karakter tersebut memungkinkan penguatan sector keamanan mengurangi porsi belanja untuk sector produktif.

Andrew Phiri (2013) meneliti hubungan dua variable tersebut di Afrika Selatan dalam rentang 1988-2015. Terdapat ketimpangan distribusi modal ke sector militer dan non militer yang umumnya lebih produktif. Dimana sector militer memiliki porsi modal yang lebih besar. Distribusi yang timpang ini membuat sector produktif merosot yang mengakibatkan perekonomian menurun. Sehingga Phiri menyarankan “...the current levels of military spending...are too high in the South African economy and need to be transferred towards more productive non-military expenditure in order to improve the performance of economic growth and other growth determinants” (Phiri, 2013). Dalam kasus ini asumsi bahwa militer yang kuat meningkatkan stabilitas keamanan yang pada akhirnya mendorong produktivitas tidak atau belum terbukti. Ini sekaligus menunjukkan bahwa belum ada perencanaan sistematis yang mengkaitkan antara peningkatan belanja militer dengan ekonomi. Konteks Afrika Selatan mempertegas perbedaan pengelolaan hubungan dua variable tersebut di negara maju dan berkembang.

Mduduzi Biyase and Talent Zwane (2016) memperkuat temuan Phiri. Dalam level yang lebih luas, yaitu Komunitas Pengembangan Afrika Selatan (SADC) antara 1990-2005. Temuan mereka menunjukkan pola yang walaupun tidak persis, namun cukup mirip: “...military spending does not promote economic growth in the SADC countries.” Pengeluaran militer tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain

pengeluaran militer tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan ini. Penelitian ini berasumsi bahwa peningkatan belanja militer seharusnya berkorelasi positive dengan pertumbuhan, namun fakta bercerita lain, pengeluaran militer tidak memiliki dampak berarti bagi pertumbuhan. Masih membahas Afrika Selatan, Aye at all (2014), dalam rentang waktu yang lebih lama yaitu 1951 hingga 2010, mengkaitkan dua variable tersebut dengan variable ketidakstabilan struktural. Penulis menemukan "...the causal relation between military expenditure and economic growth within a country is likely to be non-linear, asymmetric and time varying..." (Aye at all, 2014, 14-15).

Selanjutnya kasus Timur Tengah dengan kasus 12 negara dalam rentang 1998-2012 menjadi sasaran studi Serkan at all (2016). Perbedaannya dalam studi ini variable konflik ditambahkan dalam analisa hubungan dua variable tersebut. Temuan menunjukkan bahwa "...defense spending has a negative effect on economic growth, which aggravates during times of internal and external conflicts." (Künü, S., Hopoglu, S., & Bozma, G., 2016). Ini sejalan dengan pendapat Karadam yang juga mengkaji Timur Tengah, ia menulis"... the effect of military expenditure on economic growth is nonlinear such that the state of the economy actually determines the effect of the former on the latter" (Karadam at all, 2017).

Efek negative pertumbuhan belanja militer terhadap ekonomi juga terjadi di Pakistan dalam rentang 1980-2013. Muhammad Haseeb (2014) menulis: "For empirical investigation, an annual time series data over the period from 1980-2013, and ARDL was used. The empirical results support the existence of long run negative relationship between defense expenditure and economic growth." (Muhammad Haseeb 2014). Argument serupa juga terdapat dibanyak literature lain yang membahas hubungan dua variable tersebut di Pakistan (Ajmair, M., at all, 2018; Reza, S. Ali, at all, 2017; Ali, A. & Ather, 2015). Selain berbagai literature sebagaimana diuraikan tersebut, masih banyak literature lain yang membahas hubungan dua variable itu di negara berkembang. (Giorgio d'Agostino, John Paul Dunne, and Luca Pieroni, 2019; Giorgio d'Agostino, J. Paul Dunne, and Luca Pieroni, 2017; Nusrate Aziz & M. Niaz Asadullah, 2017; Amna Arshad, Shabib Haider Syed, and Ghulam Shabbir, 2017; Adem Yavuz Elveren and Rachel Dunning, 2017; Ryan A. Compton and Bryan Paterson, 2016; Vusal Musayev, 2016; S. E. R. D. A. R. Kurt and E. T. Karagöl., 2015; J. Paul Dunne and Nan Tian, 2015 & 2016). Walaupun berbagai literature tersebut memuat argument yang beragam namun terdapat benang

merah yaitu bahwa di negara berkembang pertumbuhan belanja militer berefek negative terhadap ekonomi. Literature review tersebut tidak dapat menjelaskan kasus Filipina yang unik. Di sinilah letak novelty studi yang saya lakukan. Studi saya ini dapat melengkapi celah yang terdapat dalam studi-studi sebelumnya.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Investasi Tiongkok Di Filipina

Sebagai negara berkembang, Filipina seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, memiliki minat yang besar pada infrastruktur. Ketertarikan terhadap investasi asing sudah barang tentu sejalan dengan kepentingan Tiongkok untuk berinvestasi di Asia Tenggara. Meski kedua negara ini berselisih di Laut China Selatan, namun sejak Redrigo Duterte menjadi Presiden, hubungan kedua negara relatif lebih harmonis. Terjadi pergeseran orientasi Filipina dari yang sebelumnya ke USA menjadi ke Tiongkok (Montiel, C. J., Boller, A. J., Uyheng, J., & Espina, E. A., 2019). Pergeseran orientasi Filipina menarik, karena justeru terjadi ketika kompetisi AS-China sedang memanas. Secara ekonomi terjadi perang dagang antara China dan US (Li, C., He, C., & Lin, C., 2018; Lau, L. J., 2019; Chong, T. T. L., & Li, X., 2019) dan secara militer terjadi ketegangan di Laut China Selatan (Grafov, D. B., 2018).

Pergeseran tersebut dapat dipahami, Filipina tidak diuntungkan jika tetap bermusuhan dengan tetangga geografisnya yang merupakan raksasa ekonomi. China merupakan salah satu tujuan ekspor utama dan sumber bantuan bagi Filipina (Muhammad Nazaruddin Latief, 25 Maret 2019) sehingga penting untuk menjaga dan meningkatkan hubungan dengan China. Kementerian Keuangan Filipina menyampaikan bahwa hubungan ekonomi kedua negara diharapkan tumbuh dengan komitmen Beijing untuk meningkatkan perdagangan dan investasi (Muhammad Nazaruddin Latief, 25 Maret 2019). Di sisi lain, Amerika Serikat, sebagai sekutu Filipina, mengalami stagnasi ekonomi sebagai akibat dari krisis finansial (**2018**). Dengan demikian, mendekatkan diri ke China lebih prospektif bagi Filipina.

Merapatnya hubungan Filipina-China di mulai dengan interaksi para pejabat dari dua negara tersebut. Hingga 2020, Xi Jinping dan Duterte telah bertemu setidaknya 5 kali baik pada kesempatan bilateral maupun multilateral yaitu di Beijing pada 20 Oktober 2016, 15 Mei 2017 dan 29 Agustus 2019; dalam pertemuan APEC pada 11 November 2017, di Manila pada 20

November 2018. Pertemuan diantara dua presiden memiliki makna penting bagi hubungan dua negara. Secara simbolik peristiwa tersebut dapat dipahami sebagai kesungguhan dua negara untuk membangun hubungan positif. Lebih jauh kesungguhan tersebut dioperasionalkan melalui berbagai kunjungan para pejabat dua negara untuk menangani kerjasama lebih lanjut. Pada 15 November 2017, Perdana Menteri Li Keqiang melakukan kunjungan resmi ke Filipina (China.com. November 15, 2017). Selanjutnya, pada 2018, Wakil Ketua Ji Bingxuan dari Komite Tetap Kongres dan Anggota Dewan Rakyat Nasional; dan Menteri Luar Negeri Wang Yi juga mengunjungi Filipina.

Seiring meningkatnya hubungan diplomatic, volume perdagangan dua negara meningkat. Pada 2017 atau di tahun kedua Duterte sebagai Presiden, volume perdagangan Filipina-Cina mencapai \$ 50 miliar, dan investasi baru yang ditambahkan dari Cina mencapai \$ 53, 84 juta, mewakili peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 67 persen Cina menjadi mitra dagang terbesar Filipina (Jianhua, Z., November 15, 2018; China.com, 2018-02-22). Meningkatnya volume perdagangan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dua negara. Masing-masing negara memiliki akses pasar ke mitra negaranya, sehingga mendorong aktivitas produksi. Bagi Filipina sebagai negara berkembang hal ini sangat penting, pasalnya dapat menyerap tenaga kerja. Tiongkok adalah salah satu pasar bagi buah pisang yang ditanam oleh petani di Filipina, meningkatnya ekspor pisang ke China dengan demikian meningkatkan volume pekerjaan para petani di negara tersebut. Setting tersebut memungkinkan China menjadi partner perdagangan utama Filipina (Highlights of the Philippine Export and Import Statistics, January 2019).

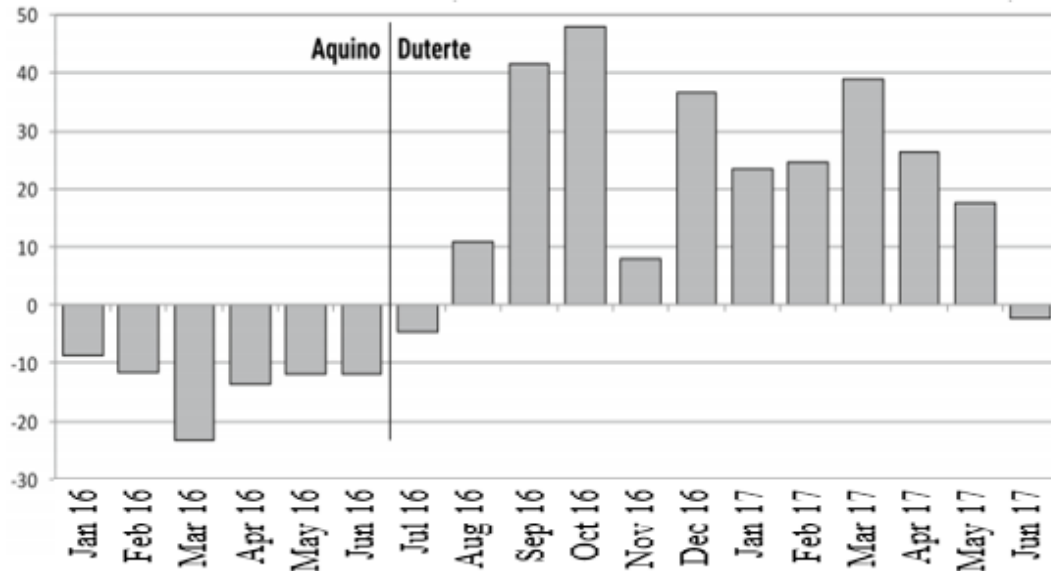


Fig. 3. The Philippine's Export to China in Aquino and Duterte era, Philippine Statistics Authority, <https://psa.gov.ph/business/foreign-trade> (Kreuzer, 2018, 20)

Di sisi lain, Filipina juga menjadi salah satu tujuan wisatawan asal Tiongkok, merapatnya kembali hubungan dua negara tidak dapat disangkal, meningkatkan industry wisata di Filipina. Selama tiga kuartal pertama tahun 2018 (atau di tahun ketiga Duterte menjadi Presiden) Filipina telah menerima lebih dari 972.000 wisatawan Tiongkok, mencapai peningkatan 34,9 persen dari tahun-ke-tahun. Peningkatan kunjungan disertai dengan pembukaan jalur penerbangan langsung dari Manila dan Cebu ke Nanning, Shanghai, Guangzhou, dan bahkan Beijing. Termasuk jalur pengiriman ke Beibu Bay, Xiamen Port, dan Shanghai Port. Pada Pada Agustus 2018, China menjadi pasar ekspor utama Filipina. Bahkan juga memberikan bantuan pembangunan infrastruktur di Marawi dan mendanai proyek-proyek di Davao untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat (Zhao Jianhua, November 15, 2018).

Bertemunya kepentingan ekonomi dua negara tersebut membuka ruang kerjasama yang lebih luas yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Hingga 2018, lebih dari 40 dokumen kerjasama telah ditandatangani (Zhao Jianhua, November 15, 2018). China aktif mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Mindanao. Perilaku pragmatis Filipina dengan memanfaatkan peluang dari Cina sangat menguntungkan. Investasi Cina di Filipina telah diarahkan ke dua pelabuhan, Cebu dan Davao. Proyek ini mencakup tambahan 20 hektar ruang penyimpanan dan 1000 jangkar baru (Turloch Mooney, February 28, 2017).

Optimalisasi fungsi pelabuhan sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Filipina adalah negara kepulauan. Salah satu konsekuensi penting dari bentuk kepulauan adalah besarnya daerah pesisir dengan masyarakat yang secara ekonomi bergantung pada laut. Tidak hanya kekayaan yang terkandung di dalamnya, laut juga dilihat sebagai penghubung dengan pusat-pusat ekonomi baik yang ada di dalam maupun diluar teretori Filipina. Tidak bisa dihindari, pelabuhan memainkan peran vital dalam perekonomian negara ini. Dengan demikian, memperkuat peran pelabuhan yang salah satunya melalui investasi dari Tiongkok sangat membantu dalam mendorong perekonomian Filipina.

Di sisi lain, sebagai eksportir buah-buahan tropis, keberadaan pelabuhan dengan layanan prima tentu sangat berguna. Proses pengiriman yang cepat dibutuhkan untuk mengirim buah-buahan bila pengiriman lambat buah-buah membusuk. Penguatan infrastruktur pelabuhan telah mengurangi biaya pengiriman barang ke Hong Kong dan Shanghai. Mengoptimalkan fungsi pelabuhan tidak hanya menjaga keberlanjutan kegiatan perdagangan tetapi juga meningkatkannya. Jika peningkatan peran pelabuhan Cebu dan Davoa yang telah disiapkan oleh kedua negara dapat dilakukan secara optimal, maka hubungan ekonomi antara Filipina dengan pusat ekonomi lainnya di kawasan tersebut (termasuk Shanghai, Hong Kong, Makau, Taiwan) otomatis meningkat.

“Despite the lockdown and quarantine measures in the past few months due to the COVID-19 pandemic, a number of flagship infrastructure projects were completed. These include (1) the Angat Water Transmission Improvement Project; (2) the Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway Rosario Exit; (3) the newly opened four-lane Sorsogon City Coastal Road; (4) New Clark City [Phase 1A]; (5) Harbor Link; (6) Sangley Airport; (7) Broadband project with Facebook [Luzon Bypass Infrastructure]; (8) Bohol-Panglao International Airport; (9) Laguna Lake Highway; (10) Cagayan de Oro Port, the country’s biggest passenger terminal port; (11) TPLEX Rosario; (12) TPLEX Pozorrubio; (13) New World-Class Terminal in Mactan-Cebu International Airport; (14) Lal-lo International Airport; and (15) Puerto Princesa International Airport.” (Anna Malindog-Uy, 13 September 2020)

Konektivitas ekonomi yang dibangun sebagai implikasi dari perluasan pembangunan jalan tol dan infrastruktur keretaapi meningkatkan hubungan ekonomi di tingkat domestic. Konektivitas berperan penting dalam meningkatkan dinamika perekonomian negara ini. Bagi negara berkembang, investasi infrastruktur merupakan berkah yang membawa banyak manfaat. Melalui jaringan infrastruktur pusat-pusat ekonomi terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan dan akhirnya terhubung dengan pusat-pusat ekonomi dunia. Agresivitas investasi China itu sulit dipungkiri berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan warga negara Filipina baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator paling mudah dilihat adalah peningkatan GDP hingga 80, 98%, dari

US\$ 173.427 juta (2008) menjadi US\$ 313.875 juta (2017) (The ASEAN Secretariat, 2018, 45). Fakta ini memperkuat teori bahwa FDI dan perdagangan berpengaruh positif terhadap PDB (Belloumi, 2014; Cicak & Soric, 2015; Mamuti & Ganic 2019; Pooja & Puri, 2018; James, 2019; Hussien 2019).

Agresivitas investasi China di Filipina, sulit dipungkiri berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertumbuhan ekonomi di tingkat domestik selanjutnya menuntut stabilitas keamanan yang lebih prima. “Economics refers to human activities in production, distribution, and consumption of goods and services, and stability is one of the key factors to whether these activities can run smoothly.” (Pramono, 2018, 153). Disaat yang sama, gangguan keamanan akibat tingginya serangan terror di Mindanao menjadi tantangan bagi pembangunan Filipina. Latar belakang tersebut mendorong Filipina meningkatkan anggaran belanja militernya.

B. Layanan Keamanan

Salah satu variable kunci dalam upaya meningkatkan layanan keamanan adalah ketangguhan militer. Bila militer kuat maka layanan keamanan dapat diandalkan. Perekonomian Filipina yang meningkat karena salah satunya oleh investasi infrastruktur memungkinkan akumulasi modal meningkat. Negara dengan cadangan modal yang meningkat sudah barang tentu meningkatkan investasi keamanan. Inilah yang dilakukan Filipina dengan meningkatkan belanja senjata hingga 50,3% dari 2.497 juta (2009) menjadi 3753 juta (2018), sebagaimana dilaporkan SIPRI.

Selain dikondisikan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, peningkatan layanan keamanan disebabkan oleh besarnya potensi ancaman terhadap stabilitas politik. Filipina adalah negara dengan jumlah serangan terrorist terbesar di Asia Tenggara. Dalam rentang 10 tahun (2008-2017) di Asia Tenggara, setidaknya terdapat 7.929 serangan teroris di mana 56% atau 4403 kali terjadi di Filipina (lihat tabel Jumlah serangan teroris di Asia Tenggara). Angka serangan terror di negara ini tidak hanya besar namun juga selalu meningkat dari tahun ke tahun selama periode tersebut. Serangan teror di Filipina adalah konteks yang membangun persepsi

ancaman baik di benak para pembuat kebijakan maupun publik di negara ini, sehingga sangat wajar jika upaya untuk meningkatkan pelayanan keamanan menjadi prioritas Filipina.

Table 3. Number of terrorist attacks in Southeast Asia

No	Countries	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1	Philippine	276	229	205	151	249	651	597	721	632	692	4403
2	Thailand	200	298	253	182	279	472	423	278	329	179	2893
3	Myanmar	20	14	11	2	17	18	15	37	74	115	323
4	Indonesia	13	19	4	21	39	32	35	29	19	27	238
5	Malaysia	2	1	-	-	2	13	12	5	19	4	58
6	Laos	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	8
7	Cambodia	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
8	Vietnam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Brunei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Singapore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	513	561	473	358	587	1188	1082	1072	1077	1018	7929

Source: Number of terrorist incident, <https://ourworldindata.org/terrorism>

Gerakan teroris di Filipina tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara gerakan separatism (Front Pembebasan Islam Moro [MILF] dan Kelompok Abu Sayyaf [ASG]) dengan jaringan internasional ISIS (IPAC, 2017; Apriani, 2018). Jaringan teroris global dan gerakan separatism di negara tersebut memiliki kesesuaian ideology, gerakan dan tujuan yang memungkinkan mereka berkolaborasi. Pertemuan kepentingan gerakan pembebasan Moro dan jaringan terorisme internasional menjadi bagian dari konteks sosial-politik yang memperkuat persepsi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Setting inilah yang telah direspon oleh pemerintah dengan meningkatkan layanan keamanan. Upaya meningkatkan belanja militer yang dilakukun Filipina tidak sia-sia. “After five months of intense fighting between Philippine government security forces and the Daesh-backed Islamist Maute group in Marawi City, the government has declared victory.” (Arab News, October 24, 2017). Kemenangan tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik di pemerintah. Keberhasilan pembangunan yang didorong salah satunya oleh investasi asing tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kemampuan finansial Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat layanan keamanan. Berbagai persiapan termasuk peningkatan kualitas senjata dan penguatan jaringan kerjasama internasional menunjukkan meningkatnya kemampuan pemerintah untuk

memobilisasi berbagai sumber daya. Dengan demikian ancaman terorisme menjadi lebih terkendali.

Perlu dicatat Filipina Selatan merupakan kawasan inti kegiatan teroris di Asia Tenggara. Sehingga keberhasilan Pemerintah Filipina dalam meningkatkan control di daerah teretornya tersebut sebenarnya merupakan kemajuan penting bagi gerakan kontra terorisme di Asia Tenggara. Peningkatan layanan keamanan Filipina tidak dapat disangkal meningkatkan stabilitas negara. Fakta ini memperkuat teori bahwa peningkatan kapasitas militer berdampak pada penguatan stabilitas politik (Simplice Asongu, Sara Le Roux, and Pritam Singh, 2020; Oladipo, A. D., Olaniran, O. D., & Akintunde, T. S., 2018). Data yang ditunjukkan Global Economic menempatkan Filipina sebagai negara dengan lompatan stabilitas paling tinggi di bawah Indonesia. Stabilitas Politik Filipina naik sebesar 0.54 dari -1.78 (2008) menjadi -1.24 (2017). Di level Asia Tenggara Indonesia menjadi negara dengan lompatan stabilitas politik paling tinggi yaitu 0.55 dari -1.06 menjadi -0.51. Sedangkan peningkatan paling tipis adalah Burma, yang meningkat sebesar 0.01 dari -1.09 menjadi -1.08 (The Global Economy). Menariknya menguatnya derajat stabilitas politik Filipina seiring dengan meningkatnya GDP negara tersebut. GDP Filipina tumbuh 80,98%, dari US \$ 173.427 juta (2008) menjadi US \$ 313.875 juta (2017) (The ASEAN Secretariat, 2018, 45). Fakta ini menguatkan teori bahwa stabilitas politik berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi (Emilia Anuta Corovei, and Adela Socol, 2019; Terpase Dennis Nomor and Paul T. Iorember, 2017; Rosario Cervantes, and Jorge Villaseñor, 2015; Ahmet Diken, Raif Parlakkaya, Erkan Kara, and Oğuzhan Kodalak, 2018).

Table 4. Political Stability (-2.5 [weak] until 2.5 [strong])

No	Country	2008	2017	The Shifting
1	Indonesia	-1.06	-0.51	0.55
2	Philippines	-1.78	-1.24	0.54
3	Thailand	-1.27	-0.76	0.51
4	Cambodia	-0.34	0.17	0.51
5	Laos	0.02	0.43	0.41
6	Singapore	1.35	1.59	0.24
7	Vietnam	0.16	0.31	0.15
8	Brunei	1.13	1.19	0.06
9	Malaysia	0.11	0.16	0.05
10	Burma (Myanmar)	-1.09	-1.08	0.01

Source: The Global Economy

BAB 5

KESIMPULAN

Mencairnya hubungan Filipina dengan China di bawah Redrigo dituntun oleh pilihan rasional. Berseteru dengan Tiongkok tidak hanya membuat Filipina harus berhadapan secara militer dengan Tiongkok namun juga tidak mendapat aliran investasi dari “raksasa” tersebut. Interaksi ekonomi dua negara selanjutnya mendorong pertumbuhan di Filipina. Di saat yang bersamaan, terjadi gangguan keamanan di Mindanao, khususnya Marawi. Stabilitas keamanan menjadi kebutuhan mendesak bagi Filipina yang sedang tumbuh. Seting tersebut memungkinkan Filipina meningkatkan belanja militer. Kebijakan meningkatkan belanja militer relative tidak mengalami hambatan karena selain besarnya ancaman dari Selatan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, meningkatnya dinamika ekonomi membuat permasalahan modal untuk menguatkan sector keamanan tidak menjadi masalah. Meningkatnya belanja militer menguatkan layanan keamanan dan akhirnya stabilitas keamanan yang berkontribusi pada penguatan ekonomi

nasional. Sehingga pertanyaan yang diajukan “mengapa terjadi peningkatan belanja senjata dan pertumbuhan secara simultan di Filipina?” telah terjawab. Kasus Filipina menarik karena mengisi kekosongan literature hubungan positif belanja militer dan pertumbuhan di negara berkembang. Bila lazimnya di negara berkembang dua variable tersebut berhubungan negative, dalam kasus Filipina justru bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Prateek. (August 1, 2017). “Characteristics of Developing Economies,” *Intelligent Economist*, <https://www.intelligenteconomist.com/characteristics-of-developing-economies/>
- Ahmed, Z., Zafar, M. W., & Mansoor, S. (2020). Analyzing the linkage between military spending, economic growth, and ecological footprint in Pakistan: evidence from cointegration and bootstrap causality. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(33), 41551-41567.
- Ajmair, M., Hussain, K., Abbassi, F. A., & Gohar, M. (2018). The impact of military expenditures on economic growth of Pakistan. *Applied Economics and Finance*, 5(2), 41-48.
- Ali, A., & Ather, M. (2015). Impact of defense expenditure on economic growth: Time series evidence from Pakistan. *Global Journal of Management And Business Research*.
- Anna Malindog-Uy (13 September 2020). “Build Build Build” Program amid a Pandemic. THE ASEAN POST, <https://theaseanpost.com/article/build-build-build-program-amid-pandemic>
- Apriani, S. W. (2018). KELOMPOK SEPARATIS PRO ISIS DI FILIPINA SELATAN. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 16(3).

- Arab News. (October 24, 2017). Philippines declares victory over Daesh in Marawi <https://www.arabnews.com/node/1182231/world>
- Arshad, A., Syed, S. H., & Shabbir, G. (2017). Military expenditure and economic growth: a panel data analysis. *Forman Journal of Economic Studies*, 13, 161-175.
- Asongu, S., Le Roux, S., & Singh, P. (2020). Fighting terrorism in Africa: complementarity between inclusive development, military expenditure and political stability. *Forthcoming, Journal of Policy Modeling*. Oladipo, A. D., Olaniran, O. D., & Akintunde, T. S. (2018). Oil revenues, defense expenditure and macroeconomic stability relationships in Nigeria (1980-2014). *Journal of Sustainable Development in Africa*, 20(1), 317-330.
- Aye, G. C., Balcilar, M., Dunne, J. P., Gupta, R., & Van Eyden, R. (2014). Military expenditure, economic growth and structural instability: a case study of South Africa. *Defence and Peace Economics*, 25(6), 619-633.
- Aziz, N., & Asadullah, M. N. (2017). Military spending, armed conflict and economic growth in developing countries in the post-Cold War era. *Journal of Economic Studies*.
- Belloumi, M. (2014). The relationship between trade, FDI and economic growth in Tunisia: An application of the autoregressive distributed lag model. *Economic systems*, 38(2), 269-287.
- Biyase, M., & Zwane, T. (2016). Military Spending and Economic Growth: Evidence from the Southern African Development Community. *Frontiers in Finance & Economics*, 13(2).
- Cervantes, R., & Villaseñor, J. (2015). Political Stability and Economic Growth: Some Considerations. *Journal of Public Governance and Policy: Latin American Review*, 1(1), 77-100.
- China.com, (2018-02-22). Cina menjadi mitra dagang terbesar Filipina, <https://indonesian.china.com/news/asia/985/20180222/1211949.html>
- China.com. (November 15, 2017) Li Keqiang dan Duterte adakan pembicaraan. <https://indonesian.china.com/news/asia/985/20171115/1127341.html>
- Chong, T. T. L., & Li, X. (2019). Understanding the China–US trade war: causes, economic impact, and the worst-case scenario. *Economic and Political Studies*, 7(2), 185-202.
- Cicak, K., & Soric, P. (2015). The interrelationship of FDI and GDP in European transition countries. *International journal of management science and business administration*, 1(4), 41-58.
- Compton, R. A., & Paterson, B. (2016). Military spending and growth: the role of institutions. *Defence and Peace Economics*, 27(3), 301-322.
- Corovei, E. A., & Socol, A. (2019). The Impact of Political Stability on Economic Growth in European Union. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 19(1), 8-14.
- d'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2017). Does military spending matter for long-run growth?. *Defence and Peace Economics*, 28(4), 429-436.
- d'Agostino, G., Dunne, J. P., and Pieroni, L. (2019). Military expenditure, endogeneity and economic growth. *Defence and Peace Economics* 30(5): 509-524.
- Diken, A., Parlakkaya, R., Kara, E., & Kodalak, O. (2018). The Relation Between Political Stability and Economic Growth: The Turkish Case. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (40), 176-185.
- Dunne, J. P. and Nan Tian. (2013). Military expenditure and economic growth: A survey. *The Economics of Peace and Security Journal* 8 (1), 5-11.
- Dunne, J. P. and Nan Tian. (2013). Military expenditure and economic growth: A survey. *The Economics of Peace and Security Journal* 8 (1), 5-11.

- Dunne, J. P., & Tian, N. (2015). Military expenditure, economic growth and heterogeneity. *Defence and Peace Economics*, 26(1), 15-31.
- Dunne, J. P., & Tian, N. (2016). Military expenditure and economic growth, 1960–2014. *The Economics of Peace and Security Journal*, 11(2).
- Elveren, A. Y., & Dunning, R. (2017). Do Military Expenditures Boost Profit Rates?.
- Grafov, D. B. (2018). The Impact of South China Sea Territorial Dispute on US–Chinese Relations. *USA & Canada: ekonomika, politika, kultura*, (9), 24-39.
- Greenhalgh, T. and Rod Taylor (1997), “How to read a paper Papers that go beyond numbers (qualitative research),” *BMJ*, VOL. 315, 20 September.
- Highlights of the Philippine Export and Import Statistics: January 2019, Tuesday, March 12, 2019 <https://psa.gov.ph/content/highlights-philippine-export-and-import-statistics-january-2019>
- Hussein, A. H. (2019). Impact of Exports on GDP and Trade Balance in Iraq For the period 2005-2005. *Tikrit Journal Of Administrative and Economic Sciences*, 4(44), 174-184.
- Feyrer, J. (2019). Trade and income—exploiting time series in geography. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(4), 1-35.
- Institute for the Policy Analysis of Conflict (IPAC). (2017). Marawi, The ‘East Asia Wilayah’ and Indonesia.
- Jianhua, Zhao. (November 15, 2018). “Working together to reinforce the three pillars for golden age of China-Philippines relations,” *The Philippine Star*, , <https://www.philstar.com/opinion/2018/11/15/1868747/working-together-reinforce-three-pillars-golden-age-china-philippines-relations>
- Kreuzer, P. (2018). *Dealing With China in the South China Sea: Duterte Changing Course* (Vol. 3, p. 33). DEU.
- Künü, S., Hopoglu, S., & Bozma, G. (2016). Conflict, defense spending and economic growth in the middle east: A panel data analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(1).
- Kurt, S. E. R. D. A. R., & Karagöl, E. T. (2015). The Effects of terrorism and defence expenditures on economic growth.
- Lau, L. J. (2019). The China–US trade war and future economic relations. *China and the World*, 2(02), 1950012.
- Li, C., He, C., & Lin, C. (2018). Economic impacts of the possible China–US trade war. *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(7), 1557-1577.
- Mamuti, A., & Ganic, M. (2019). Impact of FDI on GDP and Unemployment in Macedonia Compared to Albania and Bosnia and Herzegovina. In *Creative Business and Social Innovations for a Sustainable Future* (pp. 167-173). Springer, Cham.
- Mason, Jennifer. (2002). "Linking qualitative and quantitative data analysis." In Alan Bryman and Bob Burgess, eds. (2002). *Analyzing qualitative data*. Routledge. pp. 103-124.
- Montiel, C. J., Boller, A. J., Uyheng, J., & Espina, E. A. (2019). Narrative congruence between populist President Duterte and the Filipino public: Shifting global alliances from the United States to China. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 29(6), 520-534.
- Mooney, Turloch. (February 28, 2017). “China weighs Belt and Road projects in Philippines.” *JOC.*, https://www.joc.com/port-news/international-ports/china-weighs-belt-and-road-projects-philippines_20170228.html

- Musayev, V. (2016). Externalities in military spending and growth: The role of natural resources as a channel through conflict. *Defence and Peace Economics*, 27(3), 378-391.
- Nomor, T. D., & Iorember, P. T. (2017). Political stability and economic growth in Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 8(2).
- Phiri, A. (2019). Does military spending nonlinearly affect economic growth in South Africa?. *Defence and Peace Economics*, 30(4), 474-487.
- Pramono, S. (2018). More Guns, Less Butter?: China-US Arms Race Behind Southeast Asia's Economic Boom. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 4(01), 143-158.
- Raza, S. A., Shahbaz, M., & Paramati, S. R. (2017). Dynamics of military expenditure and income inequality in Pakistan. *Social Indicators Research*, 131(3), 1035-1055.
- Sengupta, P., & Puri, R. (2020). Exploration of relationship between FDI and GDP: A comparison between India and its neighbouring countries. *Global Business Review*, 21(2), 473-489.
- SIPRI Military Expenditure Database, April 2019, <https://www.sipri.org/databases/milex>
- The ASEAN Secretariat, *ASEAN Statistical Year Book 2018* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2018), p. 45, <https://asean.org/storage/2018/12/asyb-2018.pdf>
- The Global Economy, https://m.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
- Turcsányi, R. Q. (2018). Chinese Assertiveness in the South China Sea. *Cham: Springer*.
- Yolcu Karadam, D., Yildirim, J., & Öcal, N. (2017). Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries and Turkey: a non-linear panel data approach. *Defence and Peace Economics*, 28(6), 719-730.
- Yolcu Karadam, D., Yildirim, J., & Öcal, N. (2017). Military expenditure and economic growth in Middle Eastern countries and Turkey: a non-linear panel data approach. *Defence and Peace Economics*, 28(6), 719-730.